



**LAPORAN EVALUASI KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2025
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Laporan ini memuat uraian mengenai pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan Perjanjian Kinerja, serta realisasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, tim pelaksana kegiatan, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi, pembelajaran, serta motivasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Mallu, Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Adnan D Kasim
Nip. 19660502 200003 1 004



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Laporan ini memuat uraian mengenai pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan Perjanjian Kinerja, serta realisasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, tim pelaksana kegiatan, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi, pembelajaran, serta motivasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Adnan D Kasim
Nip: 19660502 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Maksud dan Tujuan	5
C. Ruang Lingkup	6
D. Sistematika Laporan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama	9
C. Perjanjian Kinerja	11
D. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	12
E. Rencana Aksi Kinerja	18
BAB III REALISASI KINERJA	34
A. Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV	34
B. Analisis Kinerja	56
C. Rencana Tindak Lanjut.....	64
BAB IV PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan.....	10
Tabel 2 2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan	12
Tabel 2 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan	13
Tabel 2 4 Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis	19
Tabel 2 5 Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
Tabel 2 6 Rencana Anggaran Belanja Perubahan Program dan Kegiatan	32
Tabel 3 1 Target dan Realisasi Triwulan IV untuk Pencapaian Sasaran Strategis ..	34
Tabel 3 2 Jumlah Kematian Balita di Wilayah Kerja Puskesmas	37
Tabel 3 3 Jumlah Kasus Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas	38
Tabel 3 4 Jumlah Kasus Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis.....	41
Tabel 3 5 Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran	46
Tabel 3 6 Analisis Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Triwulan IV	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Hal tersebut menuntut adanya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tepat, jelas, terukur, serta sah secara hukum (*legitimate*), sehingga mampu berjalan secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan ini mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur melalui penyusunan laporan kinerja secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebagai landasan dalam pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja perangkat daerah.

Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini disusun untuk menggambarkan capaian kinerja Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan, sekaligus menyediakan informasi kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan, evaluasi, serta perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan bagian penting dari proses manajemen kinerja yang menggambarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan, serta menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025, serta menilai tingkat pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- Menyajikan informasi kinerja yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai capaian kinerja Dinas Kesehatan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan daerah dan pemangku kepentingan.
- Menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan, serta hambatan dalam pencapaian kinerja.
- Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result-based management*).
- Memberikan bahan masukan dalam pengambilan keputusan strategis, penyempurnaan perencanaan, serta penguatan manajemen kinerja instansi pemerintah di bidang kesehatan pada tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Program dan Kegiatan
Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.
2. Capaian Kinerja
Pengukuran dan penilaian terhadap capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025.
3. Analisis dan Evaluasi Kinerja
Analisis terhadap tingkat pencapaian kinerja, termasuk identifikasi keberhasilan, permasalahan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025, serta upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan.
4. Penggunaan Anggaran
Penyajian informasi mengenai realisasi anggaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan.
5. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Perumusan rekomendasi serta langkah-langkah strategis yang diperlukan sebagai bahan perbaikan kinerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan capaian kinerja Triwulan IV.

Bab II Laporan Capaian Kinerja

Menyajikan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025, serta capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025.

Bab III Penutup

Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 2025 serta rekomendasi sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur sebagai landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Perencanaan kinerja disusun untuk memastikan keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, sehingga penyelenggaraan urusan kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam konteks evaluasi akhir tahun, perencanaan kinerja yang disajikan dalam Bab ini menjadi acuan dalam menilai kesesuaian antara rencana dan capaian kinerja yang telah direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Adapun perencanaan kinerja Dinas Kesehatan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, kebijakan nasional di bidang kesehatan, serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Tahun 2025.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah pembangunan kesehatan daerah selama lima tahun. Renstra ini disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur serta Asta Cita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, percepatan transformasi kesehatan, serta dukungan terhadap digitalisasi tata kelola pemerintahan.

Sejak Triwulan III Tahun 2025, Renstra periode 2025–2029 mulai diimplementasikan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Kesehatan. Implementasi ini menandai peralihan dari dokumen perencanaan periode sebelumnya menuju arah pembangunan kesehatan yang lebih terstruktur, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Seluruh indikator kinerja utama, indikator sasaran strategis, serta target capaian jangka menengah

mulai digunakan sebagai dasar penyusunan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja perangkat daerah.

Dalam konteks Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, evaluasi difokuskan pada kesesuaian antara perencanaan dalam Renstra dengan realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran. Evaluasi ini mencakup pencapaian indikator prioritas, efektivitas pelaksanaan program pada masa awal implementasi Renstra, serta identifikasi kendala yang dihadapi selama proses transisi perencanaan.

Hasil evaluasi awal implementasi Renstra Tahun 2025–2029 tersebut menjadi dasar dalam perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya, guna memastikan pencapaian target pembangunan kesehatan secara optimal. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur juga disusun selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”**, yang dijabarkan melalui misi pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dengan demikian, sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan berkontribusi langsung terhadap pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur mampu mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU bersifat key indicator, yaitu indikator prioritas yang dipilih dari berbagai indikator kinerja karena paling merepresentasikan capaian sasaran strategis serta keberhasilan pelaksanaan misi pembangunan kesehatan daerah.

Sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, IKU ditetapkan sebagai indikator strategis yang terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil. Penetapan IKU dilakukan melalui proses reviu dan penyelarasan dengan kebijakan nasional di bidang kesehatan, termasuk hasil reviu Kementerian Kesehatan, sehingga indikator yang digunakan mencerminkan isu prioritas pembangunan kesehatan serta kebutuhan daerah.

Berdasarkan hasil revidi tersebut, IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur mengalami penyesuaian dan ditetapkan meliputi: jumlah kematian ibu, angka kematian balita, prevalensi stunting, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage), serta rasio Puskesmas per jumlah penduduk. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat fokus kinerja pada upaya penurunan angka kematian, perbaikan status gizi, pengendalian penyakit menular, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan dasar.

Sejak Triwulan III Tahun 2025, pengukuran IKU mulai diterapkan sebagai instrumen utama evaluasi kinerja. Dalam konteks Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, capaian IKU dianalisis secara akumulatif sampai dengan akhir tahun anggaran sebagai dasar penilaian kinerja awal implementasi Renstra 2025–2029. Dengan demikian, IKU berfungsi sebagai penghubung antara perencanaan jangka menengah dan realisasi kinerja tahunan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan dan penguatan program kesehatan pada tahun berikutnya.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur pada dokumen Renstra periode Tahun 2025-2029,

Tabel 2 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Arah Capaian	Sumber Data
1	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang dilaporkan dalam satu tahun	Kasus	Menurun	Sistem Pencatatan dan Pelaporan KIA(Puskesmas /RS)
2	Angka Kematian Balita	Jumlah kematian anak usia 0–59 bulan dalam satu tahun per 1.000 kelahiran hidup	Per 1.000 KH	Menurun	Sistem Informasi Kesehatan, Puskesmas, RS
3	Prevalensi Stunting	Persentase balita usia 0–59 bulan dengan status gizi pendek dan sangat pendek berdasarkan standar antropometri	(%)	Menurun	E-PPGBM / Survei Status Gizi
4	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	Persentase kasus TB yang ditemukan dan diobati sesuai standar dibandingkan dengan estimasi jumlah kasus TB	(%)	Meningkat	Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB)

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Satuan	Arah Capaian	Sumber Data
5	Rasio Puskesmas per Jumlah Penduduk	Perbandingan jumlah Puskesmas terhadap jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Luwu Timur	Rasio	Meningkat	Profil Kesehatan / Data Dinas Kesehatan

Sumber: Renstra Dinkes Tahun 2025-2029

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan instansi dengan atasan langsungnya, yang memuat komitmen untuk melaksanakan program, kegiatan, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja instansi.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan Renstra dan IKU, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur juga menyusun Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati sebagai bentuk komitmen dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator, target tahunan, serta alokasi sumber daya yang harus dicapai pada tahun berjalan.

Dalam konteks Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025, Perjanjian Kinerja digunakan sebagai acuan utama dalam menilai capaian kinerja Dinas Kesehatan sampai dengan akhir tahun anggaran. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi capaian kinerja, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan, permasalahan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai kontrak manajerial yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan tahun 2025 yang terdapat pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 2 2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya keselamatan ibu hamil, bersalin, dan nifas melalui pelayanan kesehatan ibu yang bermutu dan berkesinambungan.	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	6
2	Meningkatnya kelangsungan hidup dan kesehatan balita melalui pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif.	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	15,06
3	Meningkatnya status gizi dan tumbuh kembang balita	Prevalensi Stunting	%	20,50
4	Meningkatnya pengendalian tuberkulosis melalui penemuan kasus dan pengobatan yang tuntas sesuai standar	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	100
5	Meningkatnya akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.	Rasio Puskesmas per jumlah penduduk	Rasio	0.055
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,01

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2025

D. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, Dinas Kesehatan melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan. Program-program tersebut difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, percepatan penurunan stunting, peningkatan status gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penguatan sistem informasi kesehatan berbasis digital sebagai bagian dari transformasi tata kelola pelayanan kesehatan.

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik dan selaras dengan arah kebijakan Renstra serta Perjanjian Kinerja. Program prioritas seperti peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar melalui optimalisasi Puskesmas dan Posyandu, peningkatan cakupan imunisasi, serta pelaksanaan intervensi gizi sensitif dan spesifik dalam upaya penurunan stunting telah dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja. Selain itu, subkegiatan pendukung seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan terus dilaksanakan guna mendukung pencapaian target kinerja tahunan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja, antara lain keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, tantangan pemerataan pelayanan di wilayah terpencil, serta percepatan integrasi digitalisasi layanan kesehatan. Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah perbaikan, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta penyempurnaan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya

Berikut tabel program, kegiatan dan sub kegiatan beserta anggaran yang digunakan pada tahun 2025:

Tabel 2 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	122,815,579,276
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	56,321,454,208
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2 Unit	14,279,471,648
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit	21,857,985,556
Pengembangan Puskesmas	10 Unit	5,484,924,554
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Unit	1,832,070,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1 Unit	197,580,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	608,675,000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7 Unit	2,712,778,000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	179 Unit	128,310,000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan	2 Paket	8,991,366,350
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	4 Keluarga	41,276,000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, BHP/ BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	216 Paket	187,017,100
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	66,436,203,960
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4239 Orang	9,889,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4239 Orang	3,528,174,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4214 Orang	68,604,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	23736 Orang	15,644,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11616 Orang	31,311,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	103150 Orang	11,498,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20856 Orang	27,293,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13214 Orang	9,388,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4362 Orang	7,821,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	400 Orang	10,775,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6414 Orang	46,912,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5230 Orang	194,600,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12 Dokumen	20,869,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen	96,435,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	18 Dokumen	48,180,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	65 Dokumen	146,463,000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20 Dokumen	257,716,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	8,543,000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	86,632,660
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	454,049,000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	60,220,348,100
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	545 Orang	15,927,000
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1992 Paket	252,937,500
Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	11 Dokumen	236,234,000
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	14,555,000
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	18 Unit	36,061,300
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	88,444,400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	450 Orang	9,826,000
Pegelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	150 Orang	8,298,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	2000 Orang	40,975,000
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	4 Dokumen	298,360,100
Pengelolaan Layanan Imunisasi	14 Dokumen	85,176,200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	48,264,700
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	15,523,108
Pengelolaan sistem informasi	1 Dokumen	15,523,108
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	42,398,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	2 Unit	42,398,000
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	83.13%	3,054,264,700

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	100%	25,334,000
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	800 Dokumen	25,334,000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten/ Kota	100%	2,456,250,000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	350 Dokumen	2,456,250,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	572,680,700
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	80 Laporan	572,680,700
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	75%	531,840,000
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	98,720,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Dokumen	98,720,000
Penerbitan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	220,980,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	120 Dokumen	220,980,000
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	212,140,000
Pemeriksaan Post Market pada Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	120 Unit	212,140,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100%	111,205,000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota	100%	111,205,000
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	22 Dokumen	111,205,000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan
Daya Masyarakat (UKBM)		
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	140,983,379,075
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	79,012,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	36,465,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5,310,000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,160,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	35,077,800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	134,871,345,825
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1118 Laporan	134,748,181,075
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	123,164,750
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	32,721,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	32,721,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	9,200,000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	9,200,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	178,584,000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	102,539,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	76,045,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	297,160,450
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	9,400,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	6,207,400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	16,244,500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	17,767,050
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	12 Dokumen	10,200,000
Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	17,759,600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	219,581,900
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,223,875,000
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 Unit	853,800,000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran Perubahan
Pengadaan Mebel	60 Unit	146,100,000
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	10 Unit	175,525,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	48,450,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,889,310,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000 Laporan	8,655,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Lap	157,080,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	3,723,575,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	402,170,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23 Unit	160,960,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43 Unit	41,210,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	200,000,000
TOTAL		267,496,268,051

Sumber: DPA-P Dinkes TA 2025

E. Rencana Aksi Kinerja

Sebagai upaya untuk memastikan ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Perjanjian Kinerja, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Aksi Kinerja sebagai pedoman operasional pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Rencana Aksi Kinerja memuat penjabaran tahapan pelaksanaan secara lebih rinci, meliputi jadwal pelaksanaan, penanggung jawab unit kerja, serta indikator keberhasilan yang digunakan sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja.

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025, Rencana Aksi Kinerja telah digunakan sebagai instrumen pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja. Rencana aksi ini berperan dalam membantu identifikasi kegiatan prioritas, pengendalian pelaksanaan sesuai jadwal, serta memastikan keterpaduan langkah seluruh unit kerja dalam mencapai sasaran strategis. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan

program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan tindak lanjut dan penyempurnaan rencana aksi pada tahun berikutnya guna meningkatkan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.

Adapun Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 4 Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	0	0	0	6
	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	0	0	0	15,06
	Prevalensi Stunting	%	0	0	0	20,50
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	0	0	0	100
	Rasio Puskesmas per jumlah penduduk	Rasio	0	0	0	0,055
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	0	0	0	75,01

Selanjutnya pada tabel dibawah ini dapat dilihat rencana aksi untuk program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025:

Tabel 2 5 Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	25	50	75	100
	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	25	50	75	100
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%	25	50	75	100
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	25	50	75	100
	Persentase pelayanan	100%	25	50	75	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
	kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar					
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	25	50	75	100
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	25	50	75	100
	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%	25	50	75	100
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%	25	50	75	100
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100%	25	50	75	100
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	25	50	75	100
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yg melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) sesuai standar	100%	25	50	75	100
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan sesuai standar	70%	15	30	45	70
	Persentase pemenuhan obat, alat kesehatan, dan Bahan Habis Pakai yang tersedia	29%	5	10	15	29
Pembangunan Rumah	Jumlah Rumah Sakit	2 Unit	0	0	1	1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan Lainnya yang di bangun	6 Unit	0	0	3	3
Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan prasarananya	10 Unit	0	0	4	5
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	10 Unit	0	0	5	5
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	1 Unit	0	0	1	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	0	1	1	1
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	7 Unit	0	0	2	3
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	179 Unit	0	0	79	100
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin,	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai,	2 Paket	0	0	1	1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan	vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	4 Keluarga	4	4	4	4
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, BHP/ BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, BHP/BMHP, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	216 Paket	0	72	72	72
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Aktif	95%	95	95	95	95
	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	100%	100	100	100	100
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi Paripurna	0	0	0	0	0
	Persentase desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM	50%	10	20	30	50
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4239 Orang	1000	2100	3200	4239
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4239 Orang	1000	2100	3200	4239
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4214 Orang	1000	2050	3150	4214
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23736 Orang	5400	10000	16000	23736

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11616 Orang	0	0	0	11616
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	103150 Orang				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20856 Orang	5500	11000	1750	20856
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13214 Orang	3000	6000	9000	13214
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4362 Orang	1000	2000	3000	4362
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	400 Orang	400	400	400	400
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6414 Orang	1500	3000	4500	6414
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5230 Orang	1000	2000	3000	5230
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau	12 Dokumen	12	12	12	12

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
	berpotensi bencana sesuai standar					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	3 Dokumen	3	3	3	3
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	18 Dokumen	18	18	18	18
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	65 Dokumen	3	6	9	65
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	20 Dokumen	3	6	5	20
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	12 Dokumen	12	12	12	12
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	52 Dokumen	52	52	52	52
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	7 Dokumen	7	7	7	7
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12	12	12	12
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	545 Orang	10	25	40	75
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	1992 Paket	400	800	1300	1992
Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggara	11 Dokumen	11	11	11	11

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
	Kabupaten/ Kota Sehat					
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	2 Dokumen	2	2	2	2
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/ Kota	18 Unit	18	18	18	18
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC) 119 tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	1 Unit	1	1	1	1
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	450 Orang	100	200	300	425
Pegelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	150 Orang	30	60	90	120
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2000 Orang	250	500	750	1000
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	4	4	4	4
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan imunisasi	14 Dokumen	14	14	14	14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan haji	1 Dokumen	1	1	1	1
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase data sarana dan prasarana FKTP yang dimutakhirkan	100%	20	40	60	80.01
Pengelolaan sistem	Jumlah dokumen hasil	1	1	1	1	1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
informasi	pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen				
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang diterbitkan	100%	0	100	0	0
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindak lanjuti perizinannya	2 Unit	0	2	0	0
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang berkompeten	83.13%	20	40	60	83.13
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase kepemilikan SIK/ SIP bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan	100%	25	50	75	100
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	800 Dokumen	200	400	600	800
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata distribusi pemerataan sumber daya manusia kesehatan	100%	25	50	75	100
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	350 Dokumen	12	12	12	12
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100%	25	50	75	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	80 Laporan	10	30	50	80
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan	75%	10	20	40	73.01
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasilitas pelayanan farmasian yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	20	40	60	95.01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional	50 Dokumen	10	20	30	50
Penerbitan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	100%	10	20	30	50.01
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan nomor PIRT sbg izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri RT	120 Dokumen	30	30	30	30

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan Minuman Industri RT	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	100%	10	20	30	50.01
Pemeriksaan Post Market pada Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman IRT beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	120 Unit	30	30	30	30
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif	100%	25	50	75	100
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota	Persentase Posyandu Siklus Hidup	100%	128	128	128	128
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22 Dokumen	5	5	6	6
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	25	50	75	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	25	50	75	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	1	2	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0	0	1	1

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1	0	0	1
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	4	2	2	2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	25	50	75	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1118 Laporan	1118	1118	1118	1118
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triulan/ Semester SKPD	18 Laporan	4	5	4	5
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang di administrasi sesuai standar	100%	25	50	75	100
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penataushaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	1	1	1	1
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100%	25	50	75	100
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	1	1	1	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	25	50	75	100
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi	12 Dokumen	3	3	3	3

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
	Kepegawaian					
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	0	2	5	10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	100%	25	50	75	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	0	0	1	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	2 Paket	0	1	0	1
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	0	0	1	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0	1	1	1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	3	3	3	3
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	3	4	4	4
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	50	50	60	67
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	25	50	75	100
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	0	0	3	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Pkt Mebel yg disediakan	60 Unit	0	0	29	0

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan			
			I	II	III	IV
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit dan Mesin Lainnya	10 Unit	0	0	5	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	0	0	3	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata" capaian kinerja jasa penunjang urusan PD	100%	25	50	75	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000 Laporan	1250	1250	1250	1250
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3	3	3	3
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3	3	3	3
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	25	50	75	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	0	5	7	11
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	0	10	10	23
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	0	0	1	1

Sumber: DPA-P Dinas Kesehatan Tahun 2025

Sementara itu untuk rencana anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2 6 Rencana Anggaran Belanja Perubahan Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan	Rencana Anggaran Triwulan			
		I	II	III	IV
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	122,815,579,276	0	0	0	122,815,579,276
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	56,321,454,208	0	0	0	56,321,454,208
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	66,436,203,960	0	0	0	66,436,203,960
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	15,523,108	0	0	0	15,523,108
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	42,398,000	0	0	0	42,398,000
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3,054,264,700	0	0	0	3,054,264,700
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	25,334,000	0	0	0	25,334,000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten/ Kota	2,456,250,000	0	0	0	2,456,250,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	572,680,700	0	0	0	572,680,700
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	531,840,000	0	0	0	531,840,000
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	98,720,000	0	0	0	98,720,000
Penerbitan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	220,980,000	0	0	0	220,980,000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan	Rencana Anggaran Triwulan			
		I	II	III	IV
Tangga					
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	212,140,000	0	0	0	212,140,000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	111,205,000	0	0	0	111,205,000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota	111,205,000	0	0	0	111,205,000
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	140,983,379,075	0	0	0	140,983,379,075
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79,012,800	0	0	0	79,012,800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	134,871,345,825	0	0	0	134,871,345,825
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32,721,000	0	0	0	32,721,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	9,200,000	0	0	0	9,200,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178,584,000	0	0	0	178,584,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	297,160,450	0	0	0	297,160,450
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,223,875,000	0	0	0	1,223,875,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,889,310,000	0	0	0	3,889,310,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402,170,000	0	0	0	402,170,000
TOTAL	267,496,268,051	0	0	0	267,496,268,051

Sumber: DPA-P Dinkes TA 2025

BAB III

REALISASI KINERJA

Bab III menyajikan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 sebagai hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 serta menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan program pembangunan kesehatan, dilengkapi dengan analisis perbandingan antara target dan realisasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

A. Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV

Tingkat Pencapaian Kinerja merupakan ukuran sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat direalisasikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025. Pengukuran capaian kinerja ini digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2025, serta menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan kinerja dan perumusan kebijakan serta langkah perbaikan pada tahun berikutnya.

Adapun rincian target dan realisasi indikator kinerja Triwulan IV Tahun 2025 untuk pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut,

Tabel 3 1 Target dan Realisasi Triwulan IV untuk Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	6	5	120,00
	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	15,06	16,26	92,62
	Prevalensi Stunting	%	20,50	21,8	94,04
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	100	100	100
	Rasio Puskesmas per jumlah penduduk	Rasio	0,055	1,65	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,01		

Sumber: Laporan Kinerja Bidang Tahun 2025

Secara umum, capaian indikator kinerja sasaran strategis pada Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian yang bervariasi. Beberapa indikator telah mencapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, sementara indikator lainnya berada pada kategori mendekati target. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan perencanaan yang ditetapkan, namun masih diperlukan upaya penguatan dan perbaikan pada indikator tertentu. Uraian lebih lanjut mengenai capaian masing-masing indikator disajikan pada pembahasan berikutnya.

Berikut penjelasan untuk indikator kinerja tersebut:

1. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu merupakan jumlah kasus kematian ibu yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas (42 hari setelah persalinan) yang tercatat dan terverifikasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan di wilayah kabupaten.

Target Angka kematian (AKI) Tahun 2025 secara Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu 122 per 100.000 KH sedangkan target kabupaten untuk jumlah kematian yaitu maksimal 6 kasus.

Jumlah kasus kematian ibu hingga bulan Desember Tahun 2025 tercatat sebanyak 5 kasus. Kasus tersebut tersebar di beberapa wilayah kerja Puskesmas, yaitu Puskesmas Tomoni sebanyak 1 kasus, Puskesmas Nuha sebanyak 2 kasus, Puskesmas Wawondula sebanyak 1 kasus, dan Puskesmas Mahalona sebanyak 1 kasus. Berdasarkan penyebab kematian, terdapat 1 kasus disebabkan oleh infeksi, 2 kasus akibat perdarahan, serta 2 kasus akibat penyebab lain, salah satunya karena cardiac arrest.

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur bersama Puskesmas telah melaksanakan berbagai intervensi pencegahan yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu. Intervensi tersebut meliputi pemberian pelayanan kesehatan

selama kehamilan dan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan kapasitas petugas melalui pelaksanaan On The Job Training (OJT) bagi petugas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di rumah sakit rujukan, yang selanjutnya telah dipraktikkan di masing-masing Puskesmas.

Selain itu, upaya pencegahan juga dilakukan melalui pendampingan tim ahli, yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dalam pelayanan kesehatan ibu, penanganan kegawatdaruratan neonatal, serta tata laksana rujukan. Untuk mendukung akses persalinan yang aman, Dinas Kesehatan juga menyediakan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) bagi ibu hamil dengan domisili jauh dari fasilitas kesehatan, yang berlokasi di TTK Kabupaten (dekat RS I Lagaligo), TTK Puskesmas Mangkutana, dan TTK Puskesmas Bantilang.

Secara komparatif, jumlah kematian ibu pada Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebanyak 5 kasus, mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024 yang mencapai 6 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pelayanan kesehatan ibu, meskipun tetap diperlukan penguatan intervensi pencegahan dan penanganan faktor risiko untuk menekan angka kematian ibu secara lebih optimal.

2. Angka Kematian Balita

Angka kematian balita merupakan jumlah kematian anak usia di bawah lima tahun per 1.000 kelahiran hidup yang tercatat dalam sistem informasi kesehatan daerah pada periode tertentu. Indikator ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi kesehatan balita di daerah sebagai hasil akumulasi upaya pelayanan kesehatan dasar, gizi, imunisasi, dan pencegahan penyakit. Capaian indikator ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Target Angka Kematian Balita pada tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu ≤ 25 per 1.000 kelahiran hidup. Target tersebut berlaku hingga akhir periode Renstra. Sementara itu untuk target kabupaten tahun 2025 sebesar 15,06 per 1.000 KH, dengan realisasi sebesar 16,26 per 1.000 KH.

Jumlah kasus kematian balita sampai pada akhir tahun 2025 sebanyak 9 kasus kematian. Berdasarkan wilayah kerja maka kasus kematian balita terdapat di wilayah kerja Puskesmas Burau sebanyak 1 kasus dengan

penyebab kematian pneumonia. Di wilayah kerja Puskesmas Wotu sebanyak 4 kasus dengan penyebab, kelainan kromosom, bentuk penyakit jantung lainnya, infeksi saluran pernapasan bawah akut lainnya dan kelainan metabolik. Di wilayah kerja Puskesmas Tomoni sebanyak 1 kasus dengan penyebab, penyakit sistem saluran cerna. Di wilayah kerja Puskesmas Lampia sebanyak 1 kasus dengan penyebab, jantung. Di wilayah kerja Puskesmas Bantilang sebanyak 1 kasus dengan penyebab infeksi pada kulit dan jaringan subkutan. Di wilayah kerja Puskesmas Bonepute sebanyak 1 kasus dengan penyebab kematian yaitu Pneumonia.

Secara lebih lengkap tentang kematian bayi berdasarkan wilayah kerja puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 2 Jumlah Kematian Balita di Wilayah Kerja Puskesmas

Puskesmas	Jumlah Kematian	Penyebab Kematian
Burau	1	Penumonia
Wotu	4	<ul style="list-style-type: none"> - Kelainan kromosom - Bentuk penyakit jantung lainnya - Infeksi saluran pernapasan bawah akut lainnya - Kelainan metabolik
Tomoni	1	Penyakit sistem saluran cerna
Tomoni Timur		
Mangkutana		
Kalaena		
Angkona		
Malili		
Lampia	1	Penyakit jantung
Wasuponda		
Nuha		
Wawondula		
Timampu		
Mahalona		
Bantilang	1	Infeksi pada kulit dan jaringan subkutan
Lakawali		
Parumpanai		
Bonepute	1	Penumonia
Total		

Sumber: Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat

Salah satu permasalahan terkait pelayanan pada balita yaitu belum optimalnya cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, yang disebabkan oleh masih adanya balita yang tidak rutin datang ke Posyandu

serta keterbatasan jangkauan kunjungan rumah karena ibu dan balita tidak selalu berada di tempat, menjadi tantangan dalam upaya penurunan Angka Kematian Balita. Kondisi ini berpotensi menghambat pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini penyakit, serta penanganan balita sakit secara tepat waktu.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, intervensi pencegahan yang telah dilaksanakan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan serta penerapan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) menjadi sangat relevan. Pendekatan ini memungkinkan petugas kesehatan memberikan pelayanan yang komprehensif, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kegiatan pelayanan berbasis masyarakat seperti Posyandu dan kunjungan rumah.

Selain itu, penguatan jejaring rujukan pelayanan kesehatan serta upaya perbaikan sanitasi lingkungan juga menjadi bagian dari strategi pencegahan untuk meminimalkan risiko kesakitan dan kematian pada balita. Melalui sinergi antara pelayanan kesehatan sesuai standar dan intervensi pencegahan yang berkelanjutan, diharapkan hambatan dalam cakupan pelayanan balita dapat diminimalkan dan pencapaian indikator Angka Kematian Balita dapat terus ditingkatkan.

3. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan persentase balita usia 0–59 bulan yang mengalami stunting (panjang/ tinggi badan menurut umur < -2 SD). Data prevalensi diperoleh dari survei tahunan (seperti EPPGBM, SSGI, atau pengukuran serentak posyandu). Tidak tersedia pengukuran berbasis triwulan karena pendekatan survei membutuhkan waktu dan populasi besar.

Berikut tabel jumlah balita stunting di wilayah kerja puskesmas,

Tabel 3.3 Jumlah Kasus Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas

Puskesmas	Jumlah Balita ditimbang	Jumlah Balita Stunting	% Capaian
Burau	1279	118	9,23
Bonepute	988	63	6,38
Wotu	1851	148	8,00
Mangkutana	1798	76	4,23
Kalaena	786	54	6,87
Tomoni	1625	57	3,51

Puskesmas	Jumlah Balita ditimbang	Jumlah Balita Stunting	% Capaian
Tomoni timur	929	48	5,17
Angkona	1883	90	4,78
Lakawali	775	31	4,00
Malili	1712	43	2,51
Lampia	635	26	4,09
Parumpanai	375	27	7,20
Wasuponda	1118	91	8,14
Mahalona	475	47	9,89
Bantilang	424	21	4,95
Wawondula	1477	44	2,98
Timampu	848	13	1,53
Nuha	755	136	18,01
TOTAL	19733	1133	5,74

Sumber: Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penimbangan balita di seluruh wilayah kerja Puskesmas pada Triwulan IV Tahun 2025, tercatat sebanyak 19.733 balita ditimbang, dengan jumlah balita stunting sebanyak 1.133 balita, sehingga prevalensi stunting secara kabupaten sebesar 5,74%. Angka ini menggambarkan masih adanya balita yang mengalami gangguan pertumbuhan, meskipun secara umum prevalensi berada pada kategori relatif rendah dibandingkan total balita yang ditimbang.

Secara sebaran wilayah, prevalensi stunting tertinggi terdapat di wilayah kerja Puskesmas Nuha sebesar 18,01%, diikuti oleh Puskesmas Mahalona sebesar 9,89% dan Puskesmas Burau sebesar 9,23%. Sementara itu, prevalensi terendah tercatat di Puskesmas Timampu sebesar 1,53%, Puskesmas Malili sebesar 2,51%, dan Puskesmas Wawondula sebesar 2,98%. Variasi capaian antar wilayah ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi spesifik dan sensitif stunting yang lebih terfokus pada wilayah dengan prevalensi tinggi, serta optimalisasi pemantauan pertumbuhan balita melalui posyandu dan pelayanan kesehatan dasar.

Kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak. Masih ditemukannya kelahiran dengan kondisi berat badan lahir rendah (BBLR) sebanyak 266 serta kelahiran prematur sebanyak 70 bayi menjadi faktor awal yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting apabila tidak ditangani secara dini dan berkelanjutan. Selain itu, perilaku dan pemahaman ibu serta anggota

keluarga serumah yang masih terbatas terkait pencegahan stunting turut berdampak pada permasalahan status gizi anak, khususnya pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Faktor lain yang memperburuk kondisi stunting antara lain masih adanya ibu hamil dengan anemia yang tidak mengonsumsi tablet tambah darah (TTD), bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, balita dengan berat badan tidak naik atau mengalami gizi kurang, serta pemberian MP-ASI yang belum optimal pada usia 6 bulan ke atas. Di samping itu, kondisi higiene dan sanitasi lingkungan yang kurang baik serta perilaku merokok ayah atau anggota keluarga serumah juga menjadi faktor risiko yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan balita.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, Puskesmas bersama Dinas Kesehatan telah melaksanakan berbagai intervensi pencegahan, antara lain skrining layak hamil pada pasangan usia subur, pemeriksaan kehamilan (ANC) minimal 8 kali, konseling menyusui, pemberian PMT lokal dan PKMK bagi balita bermasalah gizi dan stunting, rujukan balita stunting ke rumah sakit, serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di posyandu. Selain itu, Dinas Kesehatan sebagai bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) terus mengoordinasikan intervensi spesifik dan sensitif lintas sektor hingga tingkat desa/kelurahan serta melakukan pelaporan aksi konvergensi melalui aplikasi Binabangda sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.

4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) merupakan persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan sesuai standar nasional dibandingkan dengan estimasi jumlah kasus tuberkulosis di wilayah kabupaten.

Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program pengendalian tuberkulosis, khususnya dalam aspek penemuan kasus dan keberlanjutan pengobatan sesuai standar. Capaian indikator dipengaruhi oleh kemampuan sistem surveilans, kepatuhan pasien terhadap pengobatan, serta akurasi estimasi kasus tuberkulosis.

Berikut data jumlah kasus penemuan dan pengobatan Tuberkulosis untuk wilayah kerja puskesmas, klinik dan rumah sakit:

Tabel 3 4 Jumlah Kasus Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis di Wilayah Kerja Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit

Layanan Kesehatan	Jumlah Kasus
Puskesmas Burau	38
Puskesmas Wotu	19
Puskesmas Tomoni	33
Puskesmas Tomoni Timur	11
Puskesmas Angkona	23
Puskesmas Malili	37
Puskesmas Lampia	13
Puskesmas Lakawali	21
Puskesmas Timampu	12
Puskesmas Mahalona	14
Puskesmas Bantilang	8
Puskesmas Wawondula	28
Puskesmas Nuha	20
Puskesmas Wasuponda	17
Puskesmas Parumpanai	5
Puskesmas Mangkutana	12
Puskesmas Kalaena	11
Puskesmas Bone Pute	9
Klinik Amal Sehat	2
Klinik Pratama Kharisma Medika	2
RS Umum Daerah I Lagaligo	256
RS Inco Sorowako PT. Vale	33
TOTAL	624

Sumber: Laporan Bidang P2

Berdasarkan Tabel 3.4, jumlah kasus penemuan dan pengobatan tuberkulosis di wilayah kerja Puskesmas, klinik, dan rumah sakit di Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 tercatat sebanyak 624 kasus. Kasus tersebut tersebar di seluruh wilayah pelayanan kesehatan, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas rujukan, dengan kontribusi terbesar berasal dari RS Umum Daerah I Lagaligo sebanyak 256 kasus, diikuti oleh Puskesmas Burau (38 kasus), Puskesmas Malili (37 kasus), Puskesmas Tomoni (33 kasus), serta RS Inco Sorowako PT. Vale (33 kasus).

Distribusi kasus ini menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan rujukan memiliki peran penting dalam penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis, seiring dengan fungsi rujukan pasien dari Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Sementara itu, penemuan kasus di tingkat Puskesmas

mencerminkan upaya aktif pelayanan kesehatan primer dalam melakukan skrining, diagnosis, dan pengobatan tuberkulosis di masyarakat. Data ini menjadi dasar evaluasi dalam penguatan strategi penemuan kasus secara aktif, peningkatan kepatuhan pengobatan, serta optimalisasi jejaring pelayanan tuberkulosis lintas fasilitas kesehatan.

Beberapa permasalahan dalam penemuan dan pengobatan tuberkulosis masih dihadapi hingga akhir Tahun 2025. Salah satunya adalah belum optimalnya penemuan dan pelaporan kasus TBC, khususnya yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan praktik mandiri, sehingga berpengaruh terhadap cakupan penemuan kasus secara menyeluruh.

Permasalahan lain yang masih ditemukan adalah faktor perilaku masyarakat, seperti rendahnya kesadaran untuk memeriksakan diri serta adanya kekhawatiran terhadap stigma dan diskriminasi di lingkungan sosial dan tempat kerja. Selain itu, keterlambatan pengobatan juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gejala TBC, di mana batuk berkepanjangan sering dianggap sebagai keluhan ringan sehingga penanganan tidak segera dilakukan.

Dari sisi pelayanan, tantangan yang dihadapi meliputi ketidakpatuhan sebagian pasien dalam menjalani pengobatan hingga tuntas, keterbatasan pendampingan Pengawas Minum Obat (PMO), serta keterbatasan sumber daya pendukung seperti tenaga kesehatan, pelatihan manajemen TBC, ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan alat Tes Cepat Molekuler (TCM). Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam pelaporan dan pelacakan kasus TBC masih perlu diperkuat agar upaya pengendalian TBC dapat berjalan lebih optimal.

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan dalam penemuan dan penanganan tuberkulosis, Dinas Kesehatan bersama Puskesmas melaksanakan berbagai intervensi pencegahan dan pengendalian TBC yang berfokus pada penguatan deteksi dini dan pencegahan penularan. Upaya tersebut dilakukan melalui skrining aktif (Active Case Finding/ACF) di komunitas, sekolah, tempat kerja, serta rumah tangga kontak erat pasien TBC, pemeriksaan dahak gratis di Puskesmas, dan pemanfaatan Tes Cepat Molekuler (TCM) sebagai alat diagnosis utama. Selain itu, dilakukan pelacakan dan pemeriksaan kontak serumah secara aktif serta pemberian Terapi

Pencegahan TBC (TPT) sesuai pedoman kepada kelompok berisiko, seperti anak usia di bawah lima tahun, lansia, ODHA, dan kontak serumah dengan risiko tinggi.

Untuk mendukung keberhasilan pengobatan dan menurunkan angka penularan, intervensi juga diarahkan pada peningkatan kepatuhan pasien dan penguatan peran masyarakat melalui edukasi dan promosi kesehatan di sekolah, posyandu, balai desa, dan tempat ibadah, termasuk upaya pengurangan stigma terhadap pasien TBC. Setiap pasien TBC didampingi oleh Pengawas Minum Obat (PMO) dari keluarga atau kader kesehatan untuk memastikan pengobatan dijalankan hingga tuntas. Selain itu, dilakukan penguatan kerja sama lintas sektor melalui pembentukan Tim Percepatan Eliminasi TBC yang melibatkan perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan guna mendukung upaya eliminasi TBC secara berkelanjutan.

5. Rasio Puskesmas

Rasio puskesmas didapatkan dari perbandingan antara jumlah Puskesmas yang tersedia dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten sebagai gambaran ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar.

Indikator ini digunakan untuk menilai kecukupan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Rasio ini merupakan prasyarat pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak secara langsung mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Berikut data jumlah puskesmas per kecamatan,

Tabel 3 5 Tabel Rasio Puskesmas

Kecamatan	Jumlah Puskesmas	Jumlah penduduk	Rasio
Mangkutana	1	23,139	1296,51
Nuha	1	25,263	1187,51
Towuti	4	51,609	2325,18
Malili	2	48,681	1232,51
Angkona	1	26,578	1128,75
Wotu	1	35,976	833,89
Burau	2	36,885	1626,68
Tomoni	1	28,83	1040,58
Tomoni timur	1	14,266	2102,90
Kalaena	1	12,418	2415,85
Wasuponda	2	22,946	2614,83
TOTAL	18	326,591	1653,44

Sumber: Data Kependudukan

Berdasarkan Tabel 3.5, jumlah Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025 sebanyak 18 Puskesmas yang melayani 326.591 penduduk, dengan rasio rata-rata 1 Puskesmas melayani 16.534 penduduk. Rasio ini menunjukkan tingkat ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dalam menjangkau kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan. Kecamatan Towuti memiliki jumlah Puskesmas terbanyak yaitu 4 Puskesmas dengan rasio 1:2.325 penduduk, sedangkan sebagian besar kecamatan lainnya memiliki 1–2 Puskesmas dengan variasi jumlah penduduk yang dilayani.

Lebih lanjut, masih terdapat perbedaan rasio antar kecamatan yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan kondisi geografis wilayah. Kecamatan Wasuponda dan Kalaena memiliki rasio penduduk per Puskesmas yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 2.614 dan 2.416 penduduk per Puskesmas, sedangkan Kecamatan Wotu dan Tomoni menunjukkan rasio yang lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara agregat ketersediaan Puskesmas telah terpenuhi, namun pemerataan akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dasar masih perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan penguatan layanan ke depan.

Untuk mendorong pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan Puskesmas sesuai dengan jumlah penduduk, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain melalui penataan kembali wilayah kerja Puskesmas dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, sebaran permukiman, serta kondisi geografis wilayah. Selain itu, penguatan fungsi jejaring pelayanan kesehatan seperti Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa perlu terus dioptimalkan, khususnya di kecamatan dengan rasio penduduk per Puskesmas yang tinggi dan wilayah yang sulit dijangkau.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan layanan kesehatan berbasis digital, seperti telemedicine dan sistem rujukan elektronik, dapat menjadi solusi pendukung untuk meningkatkan akses pelayanan tanpa harus menambah unit fisik Puskesmas dalam jangka pendek. Pemerintah daerah juga perlu mengintegrasikan hasil analisis rasio Puskesmas ini ke dalam dokumen perencanaan, baik Renstra, RKPD, maupun pengusulan DAK bidang kesehatan, sehingga pembangunan atau pengembangan fasilitas

pelayanan kesehatan ke depan dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan sesuai kebutuhan penduduk.

6. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah merupakan hasil penilaian atas tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran oleh perangkat daerah dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nilai AKIP diberikan setiap tahun melalui evaluasi tahunan oleh evaluator eksternal dalam hal ini Inspektorat.

Selanjutnya untuk capaian kinerja dan anggaran program, kegiatan, sub kegiatan sampai pada akhir tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3 5 Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Kinerja Triwulan IV		Anggaran Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	100	95,19	122.815.579.276	114.845.061.645
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%	100	96,04		
	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	100	98,66		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100	91,83		
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%	100	100		
	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	100	100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100	98,47		
	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%	100	100		
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%	100	100		
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100%	100	100		
	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100%	100	100		
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100	100		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan sesuai standar	70%	70	70	56.321.454.208	49.433.207.135

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Kinerja Triwulan IV		Anggaran Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase pemenuhan obat, alat kesehatan, dan Bahan Habis Pakai yang tersedia	29%	29	29		
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	0	0	14.279.471.648	9.363.940.569
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan Lainnya yang di bangun	6 Unit	6	5	21.857.985.556	20.237.881.590
Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan prasarannya	10 Unit	10	10	5.484.924.554	5.396.295.347
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	10 Unit	10	10	1.832.070.000	1.807.849.207
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	1 Unit	1	1	197.580.000	185.917.699
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	3	3	608.675.000	584.658.214
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	7 Unit	7	7	2.712.778.000	2.675.896.539
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	179 Unit	179	206	128.310.000	97.252.702
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan	Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	2 Paket	2	2	8.991.366.350	8.882.073.239
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	4 Keluarga	4	7	41.276.000	40.620.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Kinerja Triwulan IV		Anggaran Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, BHP/ BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, BHP/BMHP, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	216 Paket	216	216	187.017.100	160.822.029
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan masyarakat yang memiliki Jaminan Kesehatan Aktif	95%	95	94.42	66.436.203.960	65.367.758.510
	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	100%	100	98.65		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang terakreditasi Paripurna	0	0	0		
	Persentase desa / Kelurahan yang melaksanakan STBM	50%	50	38.28		
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4239 Orang	4239	4035	9.889.000	9.839.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4239 Orang	4239	4182	3.528.174.000	3.476.642.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4214 Orang	4214	4169	68.604.000	68.387.005
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23736 Orang	23736	21976	15.644.000	15.628.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11616 Orang	11616	11312	31.311.000	31.279.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	103150 Orang	103150	115034	11.498.000	11.441.137
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20856 Orang	20856	20536	27.293.000	27.256.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13214 Orang	13214	13214	9.388.000	9.293.082
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4362 Orang	4362	3420	7.821.000	7.633.538

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Kinerja Triwulan IV		Anggaran Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	400 Orang	400	557	10.775.000	10.624.985
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6414 Orang	6414	5281	46.912.000	42.504.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5230 Orang	5230	6415	194.600.000	194.600.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	12 Dokumen	12	12	20.869.000	20.658.966
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	3 Dokumen	3	3	96.435.000	94.312.100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	18 Dokumen	18	18	48.180.000	47.711.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	65 Dokumen	65	65	146.463.000	141.319.500
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	20 Dokumen	20	20	257.716.000	255.201.496
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	12 Dokumen	12	18	8.543.000	8.163.306
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	52 Dokumen	52	52	86.632.660	85.820.140
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	7 Dokumen	7	7	454.049.000	439.194.358
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12	12	60.220.348.100	59.393.191.100
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di	545 Orang	545	504	15.927.000	15.660.553

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Kinerja Triwulan IV		Anggaran Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	fasyankes dan sekolah					
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	1992 Paket	1992	1667	252.937.500	156.927.930
Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggara Kabupaten/ Kota Sehat	11 Dokumen	11	11	236.234.000	211.880.484
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	2 Dokumen	2	2	14.555.000	12.193.200
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/ Kota	18 Unit	18	18	36.061.300	33.783.760
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC) 119 tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	1 Unit	1	1	88.444.400	78.839.220
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	450 Orang	450	428	9.826.000	9.788.499
Pegelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	150 Orang	150	455	8.298.000	8.251.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2000 Orang	2000	1834	40.975.000	36.737.361
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	4 Dokumen	4	4	298.360.100	282.191.100
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan imunisasi	14 Dokumen	14	14	85.176.200	82.776.508
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan haji	1 Dokumen	1	1	48.264.700	48.027.582
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas kesehatan yang menjalankan sistem informasi	100%	100	100	15.523.108	13.970.000
Pengelolaan sistem informasi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1	1	15.523.108	13.970.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yg dikendalikan, diawasi dan	100%	100	100	42.398.000	30.126.000,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Kinerja Triwulan IV		Anggaran Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	ditindaklanjuti perizinannya					
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindak lanjuti perizinannya	2 Unit	2	2	42.398.000	30.126.000
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi	83.13%	83.13	83.13	3.054.264.700	2.768.918.839
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP	100%	100	100	25.334.000	23.816.000
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	800 Dokumen	800	800	25.334.000	23.816.000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan 9 jenis tenaga sesuai standar	100%	100	100	2.456.250.000	2.231.750.000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	350 Dokumen	350	350	2.456.250.000	2.231.750.000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	100%	100	100	572.680.700	513.352.839
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	80 Laporan	80	95	572.680.700	513.352.839
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase ketersediaan obat esensial	100%	100	100	531.840.000	331.379.349
	Persentase produk makanan dan minuman yang terjamin keamanan dan kualitasnya	35%	35	35		
	Persentase Alat Kesehatan Sesuai Standar	60%	60	50		

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Kinerja Triwulan IV		Anggaran Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pengawasan sarana kefarmasian	100%	100	70	98.720.000	65.500.000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional	50 dokumen	120	35	98.720.000	65.500.000
Penerbitan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan Industri yang memiliki sertifikat PIRT	100%	100	100	220.980.000	173.854.349
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan nomor PIRT sbg izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri RT	120 Unit	120	120	220.980.000	173.854.349
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase sarana PIRT yang memenuhi persyaratan keamanan pangan	100%	100	96	212.140.000	92.025.000
Pemeriksaan Post Market pada Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman IRT beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	120 Unit	120	115	212.140.000	92.025.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa /kelurahan dengan Posyandu Siklus Hidup yang aktif	50%	50	83.59	111.205.000	108.106.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota	Persentase Posyandu Siklus Hidup	75%	75	75.44	111.205.000	108.106.000
Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah dokumen hasil bimbingan teknis	22 dok	22	22	111.205.000	108.106.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Kinerja Triwulan IV		Anggaran Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	dan supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100	100	140.983.379.075	138.063.059.233
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100	100	79.012.800	78.578.375
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2	2	36.465.000	36.408.963
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2	2	5.310.000	5.190.550
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2	2	2.160.000	2.160.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	10	10	35.077.800	34.818.862
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	100	100	134.871.345.825	132.069.051.563,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1118 Laporan	1118	1.118	134.748.181.075	131.947.568.347
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Buanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triulan/ Semester SKPD	18 Laporan	18	18	123.164.750	121.483.216,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang di administrasi sesuai standar	100%	100	100	32.721.000	30.954.350,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penataushaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	4 Laporan	4	4	32.721.000	30.954.350
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100%	100	100	9.200.000	9.200.000,00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	4	4	9.200.000	9.200.000

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Kinerja Triwulan IV		Anggaran Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100	100	178.584.000	171.314.660,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12	12	102.539.000	102.331.160,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12	12	76.045.000	68.983.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	100%	100	100	297.160.450	289.873.861,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1	1	9.400.000	9.400.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang Disediakan	2 Paket	2	2	6.207.400	6.200.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1	1	16.244.500	16.225.550,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3	3	17.767.050	17.582.621
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12	12	10.200.000	7.200.000,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	15 Laporan	15	15	17.759.600	17.495.600,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	227	115	219.581.900	215.770.090
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	100	100	1.223.875.000	1.207.462.041,00
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	3 Unit	3	3	853.800.000	853.576.320
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	60 Unit	60	60	146.100.000	142.149.751
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Unit dan Mesin Lainnya	10 Unit	10	10	175.525.000	164.130.250,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	3 Unit	3	3	48.450.000	47.605.720

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Kinerja Triwulan IV		Anggaran Triwulan IV	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan PD	100%	100	100	3.889.310.000	3.827.859.048,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	5000 Laporan	5000	7.490	8.655.000	7.925.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	12	157.080.000	119.689.048
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	12	3.723.575.000	3.700.245.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	100	100	402.170.000	378.765.335,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	23	23	160.960.000	142.151.335
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	43	43	41.210.000	36.680.000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2	2	200.000.000	199.934.000,00
TOTAL					267.496.268.051	256.116.525.066

Sumber: Laporan RKPD Tw IV Tahun 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja dan anggaran Triwulan IV Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Sebagian besar indikator mencapai target yang ditetapkan, bahkan beberapa kegiatan menunjukkan capaian di atas 100%, yang mengindikasikan adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan, peningkatan volume layanan, atau realisasi output yang melampaui rencana awal. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta dukungan koordinasi lintas program yang berjalan dengan baik.

Namun demikian, masih terdapat kegiatan dengan capaian di bawah target, salah satunya dengan realisasi sekitar 50%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal. Rendahnya capaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan pada akhir tahun anggaran, kendala teknis di lapangan, penyesuaian kebijakan, maupun faktor eksternal seperti kondisi geografis dan partisipasi sasaran yang belum maksimal. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Dari sisi anggaran, capaian kinerja yang tinggi secara umum sejalan dengan tingkat pemanfaatan anggaran yang relatif efektif dan efisien. Kegiatan dengan capaian melebihi target menunjukkan bahwa penggunaan anggaran mampu menghasilkan output yang optimal. Sementara itu, kegiatan dengan capaian rendah perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut agar perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan ke depan dapat lebih tepat sasaran, sehingga mendukung pencapaian target kinerja secara maksimal pada tahun berikutnya.

B. Analisis Kinerja

Analisis kinerja adalah proses evaluasi atas hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pencapaian tersebut.

Berikut analisis kinerja program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sampai pada akhir triwulan empat,

Tabel 3 6 Analisis Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran Triwulan IV

Sub Kegiatan	Analisis Kinerja	
	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Target yang ditetapkan sebanyak 2 unit yaitu RS Atue dengan RS Malili. Kegiatan tersebut berupa pembangunan lanjutan untuk RS Atue dan pembangunan baru untuk RS Malili	Realisasi anggaran sebesar 65,58%
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Target 6 unit berupa pembangunan Labkesmas, Pustu Bonepute, Pustu Arolipu, Pustu Solo, Pustu Lakawali, dan Pustu Pekaloa. Sebanyak 5 unit pustu yang telah selesai tahap pembangunan dan tersisa 1 unit Labkesmas yang masih dalam tahap akhir sebesar 93,40% dan akan tetap dilanjutkan pembangunannya dengan adendum sampai selesai	Realisasi anggaran sebesar 92,59%
Pengembangan Puskesmas	Target sebanyak 10 unit berupa: 1. Pembangunan UGD dan penataan halaman pada PKM Tomoni 2. Pembangunan tempat parkir PKM Mangkutana 3. Pembangunan selasar PKM Angkona 4. Pembangunan gudang obat dan ruang bersalin pada PKM Lakawali 5. Pembangunan selasar dan rehab pagar PKM Lampia 6. Pembangunan pagar PKM Mahalona 7. Pembangunan pagar PKM Timampu 8. Rehab UGD PKM Bantilang 9. Pembangunan tempat parkir PKM Parumpanai 10. Pembangunan gudang barang dan pemasangan kanopi pada PKM Nuha	Realisasi anggaran sebesar 98,38%
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Target sebanyak 10 unit berupa: 1. Pembangunan IPAL pada PKM Wasuponda 2. Pembangunan IPAL pada	Realisasi anggaran sebesar 98,68%

Sub Kegiatan	Analisis Kinerja	
	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
	PKM Bonepute 3. Pembangunan pagar Pustu Balai Kembang 4. Penataan halaman Pustu Taripa Kemudian ada paket meubeler untuk 6 pustu yaitu Pustu Cendana Hijau, Wonorejo Timur, Tampinna, Balantang, Beringin Jaya, dan Pustu Kalpataru	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Target sebanyak 1 unit berupa rehab pagar PKM Burau	Realisasi anggaran sebesar 94,10%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Target sebanyak 3 unit yaitu: 1. Penataan halaman Pustu Sumber Agung 2. Rehab Pustu Lakawali 3. Rehab Pustu Bayondo	Realisasi anggaran sebesar 96,05%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Target sebanyak 7 paket dan semuanya terealisasi	Realisasi anggaran sebesar 98,64%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Target sebanyak 179 paket dengan realisasi 206 paket	Realisasi anggaran sebesar 75,80%
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman dan Fasilitas Kesehatan	Target sebanyak 2 paket dan semuanya terealisasi	Realisasi anggaran sebesar 98,78%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Target sebanyak 4 keluarga dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 98,41%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, BHP/ BMHP, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Target sebanyak 216 paket dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 85,99%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4035 orang, atau 95,18 dari target sasaran. Masih ada ibu hamil yang selama kehamilannya belum mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kehamilan yang tidak diinginkan	Realisasi anggaran sebesar 99,50%

Sub Kegiatan	Analisis Kinerja	
	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
	sehingga lambat memeriksakan kehamilannya. Jumlah kematian ibu pada tahun 2025 sebanyak 5 kasus.	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4182 orang atau 98,65% dari target sasaran. Masih ada persalinan yang ditolong diluar faskes sebanyak 6 kasus.	Realisasi anggaran sebesar 98,54%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 4047 atau 96,04 % dari target sasaran. masih ada beberapa bayi baru lahir yang belum mendapat pelayanan sesuai standar karena ada beberapa ibu yang ketika sudah melahirkan ikut keluarga keluar kota. Selain itu ada juga beberapa bayi yang lahir hidup yang meninggal sebelum 28 hari. Jumlah kematian bayi sebanyak 61	Realisasi anggaran sebesar 99,68%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 21796 atau 91,83% dari target sasaran. Masih ada beberapa balita yang tidak mendapat pelayanan sesuai standar, krn balita tidak rutin ke posyandu tidap bulan, dan jika dijika dikunjungi rumahnya, terkadang ibu dan balita tidak ada ditempat. Jumlah kematian balita sebanyak 9 kasus.	Realisasi anggaran sebesar 99,90%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 11.312 org atau 97,38%, belum mencapai target dikarenakan adanya perubahan target pada SPM yang telah tercantum dalam SK SPM Tahun 2025.	Realisasi anggaran sebesar 99,90%

Sub Kegiatan	Analisis Kinerja	
	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Target sebanyak 103.150 orang dengan realisasi sebanyak 115.034	Realisasi anggaran sebesar 99,51%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 20536 orang atau 98,46% dari target sasaran, masih ada beberapa lansia yang tidak mendapat pelayanan sesuai standar, karena lansia tersebut tidak aktif ikut posyandu lansia.	Realisasi anggaran sebesar 99,87%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Target sebanyak 13.214 orang dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 98,99%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Target sebanyak 4.362 orang dengan realisasi sebanyak 3.420 orang	Realisasi anggaran sebesar 97,60%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Target sebanyak 400 orang dengan realisasi sebanyak 557 orang	Realisasi anggaran sebesar 98,61%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Target sebanyak 6.414 dengan realisasi sebanyak 5.281 orang	Realisasi anggaran sebesar 90,60%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Target sebanyak 5.230 orang dengan realisasi sebanyak 6.415 orang	Realisasi anggaran sebesar 100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Target sebanyak 12 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 98,99%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Target sebanyak 3 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 97,80%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Target sebanyak 18 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,03%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Target sebanyak 65 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 96,49%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Target sebanyak 20 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,02%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Target sebanyak 12 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 95,56%

Sub Kegiatan	Analisis Kinerja	
	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Target sebanyak 52 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,06%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Target sebanyak 7 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 96,73%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Target sebanyak 12 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 98,63%
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Target sebanyak 545 orang dengan realisasi 504 orang	Realisasi anggaran sebesar 98,33%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Target sebanyak 1.992 dengan realisasi 1.667 orang	Realisasi anggaran sebesar 62,04%
Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Target sebanyak 11 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 89,69%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Realisasi anggaran sebesar 83,77%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Target sebanyak 18 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 93,68%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Target sebanyak 1 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 89,14%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Target sebanyak 450 orang dengan realisasi 428 orang	Realisasi anggaran sebesar 99,62%
Pegelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)	Target sebanyak 450 orang dengan realisasi sebanyak 455 orang	Realisasi anggaran sebesar 99,43%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Target sebanyak 2.000 orang dengan realisasi sebanyak 1.834 orang	Realisasi anggaran sebesar 89,66%
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Target sebanyak 4 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 94,58%
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Target sebanyak 14 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 97,18%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Target sebanyak 1 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,51%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Target sebanyak 1 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 89,99%

Sub Kegiatan	Analisis Kinerja	
	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Target sebanyak 2 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 71,06%
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Target sebanyak 800 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 94,01%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Target sebanyak 350 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 90,86%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Target sebanyak 80 dokumen dengan realisasi 95 dokumen	Realisasi anggaran sebesar 89,64%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Target sebanyak 50 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 66,35
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Target sebanyak 120 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 78,67
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Target sebanyak 120 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 43,38
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Target sebanyak 22 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 97.21
Penyusunan Dokumen	Target sebanyak 2 dokumen	Realisasi anggaran

Sub Kegiatan	Analisis Kinerja	
	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
Perencanaan Perangkat Daerah	dengan realisasi yang sama	sebesar 99,85%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Target sebanyak 2 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 97,75%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Target sebanyak 2 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target sebanyak 10 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,26%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Target sebanyak 1.118 orang dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 97,92%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Target sebanyak 18 laporan dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 98,63%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Target sebanyak 4 laporan dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 94,60%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Target sebanyak 4 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Target sebanyak 12 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,80%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Target sebanyak 12 orang dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 90,71%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Target sebanyak 1 paket dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Target sebanyak 2 paket dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,88%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target sebanyak 1 paket dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,88%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Target sebanyak 3 paket dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 98,96%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Target sebanyak 12 dokumen dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 70,59%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Target sebanyak 15 laporan dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 98,51%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Target sebanyak 227 laporan dengan realisasi 115 laporan	Realisasi anggaran sebesar 98,26%
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Target sebanyak 3 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,97%
Pengadaan Mebel	Target sebanyak 60 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 97,30%
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Target sebanyak 10 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 93,51%
Pengadaan Sarana dan	Target sebanyak 3 unit dengan	Realisasi anggaran

Sub Kegiatan	Analisis Kinerja	
	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	realisasi yang sama	sebesar 98,26%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target sebanyak 5.000 laporan dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 91,57%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Target sebanyak 12 laporan dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 76,20%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Target sebanyak 12 laporan dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,37%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Target sebanyak 23 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 88,31%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target sebanyak 43 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 89,01%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Target sebanyak 2 unit dengan realisasi yang sama	Realisasi anggaran sebesar 99,97%

Sumber: Laporan RKPD Triwulan IV Tahun 2025

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut merupakan serangkaian langkah perbaikan dan penguatan yang dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode tertentu, khususnya hingga akhir periode pelaporan Triwulan IV Tahun 2025. Rencana tindak lanjut berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam mengatasi kendala pelaksanaan program, memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia, serta memastikan target kinerja dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, rencana tindak lanjut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi strategi adaptif dan korektif untuk meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan kesehatan.

Pelaksanaan rencana tindak lanjut dilakukan melalui beberapa tahapan yang berkesinambungan. Tahap pertama adalah identifikasi masalah dan hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja selama triwulan berjalan maupun sepanjang tahun anggaran. Tahap kedua berupa perumusan solusi dan strategi perbaikan yang melibatkan unit kerja terkait serta didukung oleh koordinasi lintas sektor. Tahap ketiga adalah penetapan langkah operasional berupa penyempurnaan perencanaan,

percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas, maupun penyesuaian pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan untuk menilai efektivitas tindak lanjut yang telah dilaksanakan serta dampaknya terhadap capaian indikator kinerja. Hasil rencana tindak lanjut ini diharapkan menjadi dasar perbaikan pelaksanaan program dan peningkatan kinerja pada tahun berikutnya secara lebih optimal dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Bab Penutup ini disusun sebagai rangkuman akhir dari pelaksanaan dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur selama Tahun Anggaran 2025. Pada bab ini disajikan simpulan umum atas capaian kinerja yang telah diraih hingga Triwulan IV, serta gambaran pembelajaran strategis dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, Bab Penutup juga memuat saran dan tindak lanjut sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Luwu Timur.

1. Kesimpulan

Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur merupakan rangkuman akhir pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini menggambarkan capaian kinerja hingga periode Oktober sampai dengan Desember 2025, sekaligus mencerminkan kinerja tahunan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, meskipun masih dijumpai beberapa kendala dalam hal optimalisasi capaian indikator dan realisasi anggaran pada sebagian kegiatan.

Capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator strategis, khususnya pada program kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar, serta dukungan manajemen perangkat daerah, telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target tahunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal akibat keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, serta dinamika pelaksanaan kegiatan lapangan dan administrasi keuangan.

Dengan demikian, evaluasi kinerja Triwulan IV Tahun 2025 menjadi bahan refleksi dan pembelajaran penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program kesehatan selama satu tahun anggaran, serta menjadi dasar perbaikan dan penguatan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja hingga akhir Tahun 2025, beberapa saran yang dapat menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja ke depan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi lintas bidang dan lintas sektor perlu terus diperkuat guna mendukung pencapaian indikator kinerja yang memerlukan kolaborasi dengan perangkat daerah lain maupun pemangku kepentingan terkait.
2. Optimalisasi perencanaan dan pengelolaan anggaran agar pelaksanaan kegiatan lebih merata sepanjang tahun serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga teknis, khususnya dalam manajemen program, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
4. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan agar potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih dini dan ditindaklanjuti secara tepat.
5. Pemantapan pelaksanaan program prioritas daerah, seperti percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

3. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja hingga Triwulan IV Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur menetapkan beberapa langkah strategis yang akan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian indikator Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar penyempurnaan perencanaan dan penetapan target kinerja tahun berikutnya.
2. Menyelesaikan seluruh proses administrasi keuangan dan pelaporan kinerja secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.

3. Menyusun rencana tindak lanjut atas indikator kinerja yang belum mencapai target optimal, melalui perbaikan strategi, penguatan pelaksanaan program, serta peningkatan dukungan sumber daya.
4. Mengoptimalkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025.
5. Menjadikan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan kebijakan bidang kesehatan Tahun 2026 agar pelaksanaan program lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.